

Strategi Indonesia Menghadapi Hambatan Non-Tarif Uni Eropa Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Tahun 2017-2019

I Komang Bagus Krisna Bhaskara¹⁾, Penny Kurnia Putri²⁾, Adi Putra Suwecawangsa³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: baguskrisna775@gmail.com¹⁾, penny.tjokrodihardjo@gmail.com²⁾, adisuwecawangsa@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to describe Indonesia's strategy in dealing with EU non-tariff barriers to Indonesia's CPO exports using the qualitative method. The EU implemented non-tariff barriers to Indonesia's CPO imports from 2009-2017. However, Indonesia has only been aggressively responding and implementing strategies in dealing with EU obstacles since 2017. This is because there has been a direct negative impact on the Indonesian economy, including a decrease in the value of CPO exports. Therefore, the researcher uses the framework of public relations campaign and new protectionism in free trade to answer Indonesia's strategy in facing EU obstacles in 2017-2019. This study then found the answer that Indonesia's strategy was carried out through a positive campaign or white campaign to EU countries and also made a counter policy, namely protecting nickel.

Keywords: Indonesia, European Union, Campaign, New Protectionism

1. PENDAHULUAN

Uni Eropa (UE) menjadi kawasan dimana sebagian besar negara anggotanya banyak mengonsumsi minyak nabati. Dikutip dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI tahun 2017, *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi masyarakat UE. Indonesia menjadi salah satu negara produsen CPO terbesar dunia (Buletin APBN, 2018). Pada tahun 2016, Indonesia dapat menghasilkan CPO sebanyak 36 juta ton metrik (*Indonesia Investments*, 2017). Kurnianingsih (2019: 3-4) menjelaskan, tingginya konsumsi CPO oleh UE membuat Indonesia menjadikan kawasan UE

sebagai mitra utama dan potensial dalam perdagangan CPO. Ekspor CPO Indonesia ke UE mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia sekaligus menyumbang devisa negara.

Kegiatan ekspor-impor CPO Indonesia dengan UE tidak selalu berjalan lancar. Uni Eropa beberapa kali memberlakukan hambatan terhadap impor CPO Indonesia. Sampai saat ini tercatat UE telah melakukan tiga kali hambatan pada impor CPO Indonesia pada tahun yang berbeda. Hambatan yang dilakukan oleh UE bukan tanpa alasan. Banyak faktor yang menyebabkan pihak Uni Eropa menghentikan ekspor CPO Indonesia. Salah satunya dan

sekaligus menjadi factor utama adalah kerusakan lingkungan (Erman, 2018: 2).

Hambatan yang diajukan oleh UE sangat mengganggu ekspor CPO Indonesia ke UE. Selain itu resolusi yang dikeluarkan oleh UE mendatangkan kontroversi, terutama di negara kawasan Asia Tenggara yang merupakan negara-negara penghasil utama CPO, salah satunya adalah Indonesia. Belanda dan Vatikan yang merupakan dua negara anggota UE juga turut merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional tersebut. Kedua negara tersebut tidak setuju dengan kebijakan UE.

Ekspor CPO juga mengalami penurunan harga di pasar internasional akibat adanya hambatan yang dilakukan oleh UE. Oleh sebab itu, Indonesia berusaha menyusun strategi guna menyetabilkan posisi ekspor CPO dalam negeri agar kembali normal. Lebih lanjut, penulis tertarik untuk menganalisis perihal strategi apa saja yang dilakukan Indonesia dalam rangka menghadapi hambatan non-tarif oleh Uni Eropa terhadap ekspor CPO Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan tiga tulisan ilmiah sebagai kajian pustaka. Tulisan pertama dari Erwiza Erman (2017) dengan judul *“Dibalik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa”*. Tulisan kedua yang digunakan adalah karya Ardyanata Billy Habibie (2016) dengan judul *“Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Black Campaign Sawit Untuk Meningkatkan Ekspor Crude Palm*

Oil (CPO) Periode Tahun 2007-2012”. Tulisan ketiga yang digunakan adalah karya dari Ernawati Batubara (2019), dengan judul *“Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Republik Rakyat Cina”*. Ketiga tulisan tersebut mampu membantu Penulis dalam menemukan kerangka pemikiran yaitu *public relations campaign* dan *new protectionism*.

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

3.2 Tingkat Analisis

Tingkat analisis dalam jurnal penelitian ini menggunakan tingkat analisis negara yaitu Indonesia

3.3 Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data digunakan teknik studi dokumentasi.

3.5 Teknik Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik teks naratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Industri dan Kerja Sama Perdagangan Crude Palm Oil Bagi Perekonomian Indonesia

Peran penting industri CPO bagi perekonomian Indonesia dapat dijabarkan

menjadi tiga. Pertama, untuk memasok bahan baku industri minyak goreng. Dalam hal ini, CPO digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan domestik Indonesia, yakni bahan baku utama untuk pembuatan minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia (Hafizah, 2011: 155). Produk CPO juga digunakan untuk membuat minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel) (Suwarno, 2019: 23-24).

Kedua, industri CPO memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Di Indonesia sebanyak 4,2 juta penduduknya bekerja di sektor produksi kelapa sawit. Sedangkan 12 juta orang bekerja pada sektor turunannya (Bisnis Tempo, 2/11/2018). Ketiga, CPO merupakan komoditas ekspor non-migas andalan Indonesia (Hafizah, 2011). Kelapa sawit telah berkembang menjadi industri strategis yang bernilai penting bagi perekonomian Indonesia, khususnya di sisi ekspor.

Ekspor minyak sawit Indonesia salah satunya didominasi oleh negara-negara di kawasan UE. Uni Eropa menjadi merupakan negara yang sangat potensial bagi ekspor CPO Indonesia. Hal tersebut dikarenakan populasi UE yang tinggi sejalan dengan besarnya konsumsi CPO masyarakatnya (Khairunisa & Novianti, 2017: 112). Produk CPO merupakan komoditas perdagangan utama Indonesia dengan Eropa (Buletin APBN, 2018). Kawasan UE telah menjalin kerja sama impor CPO dengan Indonesia sejak tahun 1980 (GAPKI, 2017). Tidak heran jika UE menjadi salah satu mitra potensial bagi Indonesia.

4.2 Hambatan Non-tarif Uni Eropa Terhadap CPO Indonesia

Kegiatan ekspor-impor CPO Indonesia dengan UE tidak selalu berjalan lancar. Uni Eropa beberapa kali memberlakukan hambatan terhadap impor CPO Indonesia. Sampai saat ini tercatat UE telah melakukan tiga kali hambatan pada impor CPO Indonesia pada tahun yang berbeda. Hambatan pertama dilakukan tahun 2009, dimana UE melakukan upaya proteksi terhadap impor CPO. Proteksi tersebut dilakukan dengan cara menghambat CPO asal Indonesia dengan mengajukan skema Renewable Energy Directive (RED) (Firman Hidayat, 2011: 4). Berlanjut pada tahun 2013, UE menerapkan hambatan terhadap produk CPO Indonesia dengan cara memberlakukan penerapan tarif anti-dumping (Masrurroh, 2017). Sedangkan pada tahun 2017, European Parliament kembali mengeluarkan sebuah resolusi tentang aturan perdagangan CPO dan isu deforestasi. Resolusi tersebut berjudul "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest" (Katerina, 2017). Selain itu, UE juga melakukan black campaign atau kampanye hitam terhadap CPO Indonesia. Ia secara khusus menyebutkan Indonesia sebagai aktor deforestasi hutan dunia. Maka dari itu UE dan akan menghentikan impor CPO dari Indonesia (GAPKI, 2017).

4.3. Dampak Hambatan Non-Tarif Uni Eropa

Dampak dari hambatan non-tarif CPO yang diberlakukan Uni Eropa bagi Indonesia, dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Hambatan UE dapat membuat citra industri CPO menjadi semakin buruk di mata internasional.
2. Hambatan UE menyebabkan terjadinya penurunan ekspor CPO Indonesia ke negara-negara UE.
3. Terjadi penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, salah satunya terjadi di Kepulauan Riau.
4. Penurunan harga kelapa sawit juga akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi, baik dari pendapat maupun kesehatan petani kelapa sawit.

4.4 Respon Pemerintah Indonesia

Hambatan yang diberlakukan oleh UE memicu respon dari Pemerintah Indonesia selaku negara yang terdampak. Pemerintah Indonesia memrotos hambatan yang ditetapkan oleh UE terhadap CPO Indonesia. Pemerintah menyampaikan keberatan atas keputusan UE yang mengklasifikasikan CPO sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan berisiko tinggi (Katadata, 19/03/2019). Bagi Indonesia, hambatan UE terhadap impor CPO Indonesia terkesan mendiskriminasi salah satu komoditas andalan bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia juga keberatan atas sikap UE dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari CPO. Hal tersebut akan memberikan dampak negatif pada ekspor CPO Indonesia ke UE, juga akan memberikan citra buruk bagi CPO di perdagangan global (Kompas, 17/12/2019). Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menangani kasus kerusakan lingkungan dan

pelanggaran HAM akibat perluasan kebun kelapa sawit. Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap lingkungan, pemerintah mengeluarkan sistem sertifikasi bagi CPO yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Hal tersebut guna memastikan bahwa CPO yang dihasilkan berasal dari perkebunan yang ramah lingkungan (BBC Indonesia, 18/02/2016). Dilansir melalui situs resmi Forest Watch Indonesia (21/03/2017), Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi hasil Perjanjian Paris pada COP 21, membentuk Badan Restorasi Gambut Nasional, moratorium pembangunan baru di atas lahan gambut, dan berencana menerbitkan kebijakan moratorium penerbitan perizinan baru untuk sektor sawit dan tambang.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tidak akan diam saja terhadap tindakan diskriminasi oleh UE (Eva, 2019 dalam European Views). Hal tersebut dikarenakan kebijakan UE sudah termasuk dalam kategori hambatan bagi produksi CPO dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan UE perlu dihadapi oleh Pemerintah Indonesia melalui penerapan strategi, yang diharapkan mampu untuk menghadapi hambatan yang diberlakukan UE.

4.5 Strategi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Hambatan Non-tarif oleh Uni Eropa

Pemerintah Indonesia menerapkan dua strategi dalam menghadapi hambatan UE yaitu Kampanye Publik "White Campaign" CPO dan proteksionisme nikel.

Guna menghadapi hambatan dan tuduhan-tuduhan dari UE, Pemerintah Indonesia kemudian melaksanakan strategi melalui *public relations campaign* atau kampanye publik. Dalam penelitian ini, kampanye publik dilakukan sebagai strategi Pemerintah Indonesia untuk menghadapi *black campaign* yang dilakukan oleh UE terhadap produk CPO. Beberapa negara UE yang menjadi target pelaksanaan white campaign, sebagai berikut:

1. Belanda; Implementasi white campaign yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda yaitu melalui pemberian informasi terkait program pengembangan kapasitas petani kelapa sawit di daerah sehingga dapat dipastikan bahwa CPO Indonesia yang masuk ke Belanda berasal dari bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Warta ekonomi, 08/10/2019).
2. Moskwa; White campaign dilakukan melalui festival Moskwa. Kampanye tersebut dilakukan oleh Wakil Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Agam Fatchurohman, menegaskan produk makanan dan olahan yang memiliki kandungan minyak sawit aman bagi kesehatan. Indonesia melakukan expo dan riset bersama di UE (Ekonomi bisnis, 21/08/2019)
3. Jerman; Pemerintah mengadakan promosi produk kelapa sawit Indonesia dalam ajang pameran Hannover Messe (Kompas, 30/10/2019)
4. Swiss; GAPKI gencar mempromosikan kelapa sawit kepada kalangan bisnis di Swiss dalam bentuk Indonesia Business Forum

Sustainable Palm Oil in Global Market di Gedung Zunfthaus zur Meisen, Zurich pada tanggal 28 September 2017. Meskipun Swiss bukan merupakan anggota Uni Eropa, tetapi kebijakan UE berpengaruh cukup besar terhadap kebijakan Swiss, mengingat UE merupakan mitra dagang utama Swiss (Warta Ekonomi, 29/09/2017).

5. Vatikan; Tim Negosiasi RI dalam Pembatasan Produk Kelapa Sawit melakukan seminar di Vatikan untuk membahas mengenai dampak negative pelarangan impor CPO terhadap masyarakat. Seminar tersebut juga membahas upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam menjaga lingkungan (BPDP, 2018).

Selain itu, Indonesia juga melakukan white campaign melalui penggunaan media sosial. Pemerintah melakukan kampanye publik menggunakan tagar #SawitBaik yang dimulai pada tanggal 17 September, bersamaan dengan peluncuran akun Twitter @SawitBaikID (Katadata, 17/09/2019).

Terdapat beberapa aspek dalam white campaign yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara UE. Keseluruhan aspek yang disampaikan Indonesia merupakan aspek-aspek positif terkait CPO Indonesia. Aspek pertama adalah mengenai pengaruh kesehatan dari konsumsi CPO. Indonesia mempromosikan bahwa CPO tidak berbahaya bagi kesehatan. Aspek kedua yang dikampanyekan oleh Indonesia adalah yang berkaitan dengan dampak perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan. Kebun sawit Indonesia bukan sekedar menghasilkan CPO, kehadiran kebun

sawit sebagai penghasil minyak berkontribusi pada pelestarian lingkungan di bumi.

Strategi kedua Indonesia adalah dengan dengan memroteksi produk nikel. Pelarangan ekspor nikel oleh Indonesia ke UE merupakan langkah kebijakan new protectionism. Indonesia melakukan proteksionisme melalui hambatan non-tarif. Pelarangan ekspor nikel didasari oleh salah satu faktor, yaitu jika UE membatasi ekspor CPO Indonesia, maka Indonesia juga akan membatasi ekspor dari Uni Eropa. Sehingga pelarangan ekspor nikel oleh Indonesia dapat menjadi strategi pemerintah dalam menghadapi UE. Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara UE. Sehingga dengan adanya pelarangan ekspor ini berhasil membuat UE bereaksi.

4.5 Progress Kebijakan Tandingan CPO Pemerintah Indonesia Terhadap Uni Eropa

Kampanye yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara UE dan juga kebijakan proteksionisme nikel telah memberikan peluang kepada Indonesia untuk memengaruhi UE agar menegosiasikan kembali kebijakan UE terkait pelarangan impor CPO Indonesia. Sebelumnya UE telah menetapkan akan melarang impor CPO Indonesia pada tahun 2021, namun rencana tersebut akan diperbaharui oleh UE (Deutsche Welle, 20/06/2018). Vatikan yang merupakan salah satu negara UE, juga memberikan dukungannya kepada Indonesia. Direktur Lembaga Kepausan untuk Keadilan dan

Perdamaian Vatikan, Kardinal Peter Turkson, mengatakan kepada Tim Negosiasi RI dalam Pembatasan Produk Kelapa Sawit, bahwa Vatikan juga akan memberikan bantuan dalam menghadapi ancaman UE yang akan menghapus penggunaan biodiesel berbahan dasar CPO (BPDP, 2018). Selain Vatikan, Belanda juga telah bersedia untuk mendukung white campaign yang dilakukan oleh Indonesia guna menghadapi black campaign UE (Warta Ekonomi, 08/10/2019). Pernyataan tersebut dipertegas melalui Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, yang menyatakan negaranya tidak mendukung pelarangan impor CPO dari Indonesia ke Eropa (Bisnis Tempo, 20/02/2020). Hal tersebut sekaligus menjadi kemajuan positif terhadap industri sawit Indonesia dan dapat meningkatkan ekspor CPO Indonesia kedepannya.

5. KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa strategi untuk memperbaiki posisi tawar negara dalam perdagangan internasional tersebut. Strategi pertama adalah melalui public relation campaign dengan melakukan white campaign terhadap negara-negara UE. Kampanye tersebut dilakukan untuk membantah anggapan negatif UE terhadap CPO Indonesia. Strategi kedua yang dilakukan oleh Indonesia adalah menerapkan kebijakan new protectionism terhadap UE. Disini Indonesia juga melakukan hambatan non tarif dengan melarang ekspor nikel ke UE. Pelarangan ekspor nikel merupakan kebijakan tandingan Indonesia terhadap UE.

Setelah berjalan kurang lebih selama tiga tahun, strategi-strategi tersebut mampu menghasilkan perkembangan positif bagi CPO Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya penundaan pelarangan impor CPO ke UE hingga tahun 2030, dan UE juga tidak lagi melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Indonesia juga mendapatkan dukungan dari negara-negara UE terutama Vatikan dan Belanda yang bersedia membantu dalam menghadapi kebijakan pelarangan impor CPO oleh UE, sehingga perkembangan tersebut dapat meningkatkan industri CPO Indonesia dan mengembalikan citra baik CPO Indonesia di mata Internasional.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Erwiza Erman. 2017. Dibalik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43 No.1, pp. 1-13.
- Ardyanata Billy Habiebie. 2016. Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Black Campaign Sawit Untuk Meningkatkan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Periode Tahun 2007-2012. *Jurnal Hubungan Internasional FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur*, pp. 1-18.
- Ernawati Batubara. 2019. Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Republik Rakyat Cina. *Jurnal FISIP Universitas Riau*, Vol. 6: Edisi II, pp. 1-13
- GAPKI. 12 Desember 2017. Resolusi Minyak Sawit dan Isu Deforestasi", Diakses melalui <https://gapki.id/news/2389/resolusi-minyak-sawit-uni-eropa-isu-deforestasi>. diakses tanggal 11 Juli 2019.
- Buletin APBN. 2018. Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa. Diakses melalui <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-50.pdf>
- Indonesia Investments. 26 Juni 2017. Minyak Kelapa Sawit. Diakses melalui www.indonesia-investment.com: <https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?> Diakses pada tanggal 4 April 2020
- Hafizah, Dian. 2011. Kajian Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan CPO Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Integrasi Pasar. *Jurnal AGRISEP* Vol. 10 No. 2, pp. 154–170
- Suwarno, Windratmo. 2019. Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 8, No.1, pp. 23-34
- Bisnis Tempo. 2/11/2018. Bappenas: Industri Kelapa Sawit Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja. Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1142496/bappenas-industrikelapa-sawit-serap-162-juta-tenaga-kerja/full&view=ok>
- Ariyanto, Anto. n.d. Agroindustri Kelapa

- Sawit : Dampaknya Terhadap Ekonomi dan Daya Saing Indonesia. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/326115497_Literature_Review_Agroindustri_Kelapa_Sawit_Dampaknya_Terdapat_Ekonomi_dan_Daya_Saing_Indonesia
- Khairunisa, Gisa Rahma & Novianti, Tanti. 2017. Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia Di Pasar Uni Eropa. Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol 5 No 2, pp. 103-116.
- Katadata. 19/03/2019. Dengan 10 Poin, Pemerintah RI Protes Larangan Sawit oleh Eropa", Diakses melalui <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a5514b7041/dengan-10-poin-pemerintah-ri-protas-larangan-sawit-oleh-eropa>
- Kompas, 17 Desember 2019. Perang Dagang Indonesia-Uni Eropa: Sawit Ditolak, Nikel Bertindak. Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2019/12/17/121400126/perang-dagang-indonesia-uni-eropa-sawit-ditolak-nikel-bertindak?page=all>.
- CNBC Indonesia. 18/02/2016. Upaya memastikan bisnis kelapa sawit Indonesia ramah lingkungan. Diakses melalui [/2016/02/160218_majalah_sertifikasi_kelapasawit](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160218_majalah_sertifikasi_kelapasawit)
- Forest Watch Indonesia. 2017. Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Diakses melalui <https://fwi.or.id/publikasi/industri-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia/>
- Mongabay. 2/05/2018. Industri Sawit Harus Serius Terapkan Keberlanjutan Lingkungan dan Tak Langgar HAM. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/05/02/industri-sawit-harus-serius-terapkan-keberlanjutan-lingkungan-dan-tak-langgar-ham/>
- Warta Ekonomi. 8 Oktober 2019. Meneropong Strategi Kampanye Sawit Uni Eropa vs Indonesia. Diakses melalui <https://www.wartaekonomi.co.id/read250527/meneropong-strategi-kampanye-sawit-uni-eropa-vs-indonesia>
- Ekonomi Bisnis. 21 Agustus 2019. Lawan Kampanye Hitam, Pengusaha Tegaskan Minyak Sawit Aman bagi Kesehatan. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190821/12/1139470/lawan-kampanye-hitam-pengusaha-tegaskan-minyak-sawit-aman-bagi-kesehatan>
- Kompas. 30/10/ 2019. RI Sisipkan Agenda Promosi Produk Kelapa Sawit di Pameran di Jerman. Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2019/10/30/154000026/ri-sisipkan-agenda->

promosi-produk-kelapa-sawit-di-
pameran-di-jerman.

Katadata. 19/03/2019. Dengan 10 Poin,
Pemerintah RI Protes Larangan Sawit
oleh Eropa" , Diakses melalui
<https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a5514b7041/dengan-10-poin-pemerintah-ri-protos-larangan-sawit-oleh-eropa>

Warta Ekonomi. 29/09/ 2017. Sawit
Indonesia Kali Ini Dipromosikan di
Swiss. Diakses melalui
<https://www.wartaekonomi.co.id/read156055/sawit-indonesia-kali-ini-dipromosikan-di-swiss>

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)
Kelapa Sawit. (2018). Pasar Minyak
Nabati. Retrieved from
<https://www.bpdp.or.id/id/sawit-berkelanjutan/pasar-minyaknabati-dunia/>

Deutsche Welle, 20/06/2018. Uni Eropa
Tunda Larangan Sawit Hingga 2030.
Diakses melalui
<https://www.dw.com/id/uni-eropa-tunda-larangan-sawit-hingga-2030/a-44315242>

Bisnis Tempo, 20/02/2020. Belanda Tidak
Dukung Boikot Sawit Indonesia.
Diakses melalui
<https://bisnis.tempo.co/read/1309938/belanda-tidak-dukung-boikot-sawit-indonesia/full&view=ok>